



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	18 (<i>delapan belas</i>)
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Virtual Komisi VI DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
Hari, Tanggal	:	Selasa, 28 April 2020
Pukul	:	11.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan Kondisi Aktual terkait Dampak Covid 19
Hadir	:	1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Ir. Achmad Sigit Dwiwahjono, M.P.P., 3. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Ir. Abdul Rochim, M.Si., 4. Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Ir. Muhammad Khayam, M.T., 5. Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, S.Teks, M.A., 6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Virtual Komisi VI DPR RI pada pukul 11.14 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 27 April 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid 19, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilakukan secara virtual.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memperbarui peta jalan (*roadmap*) industri nasional baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk mengetahui kapasitas industri nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional serta dalam rangka mewujudkan ketahanan industri nasional.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian untuk menyusun dan mengimplementasikan langkah strategis termasuk kegiatan penelitian dan pengembangan serta mengoptimalkan sumber daya hayati Indonesia yang kaya sebagai bahan baku industri dalam negeri dalam rangka mewujudkan ketahanan industri nasional.
3. Komisi VI DPR RI melihat industri di Indonesia memiliki ketergantungan sangat besar terhadap impor bahan baku dan bahan penolong serta menjadikan Pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk pertumbuhan industri nasional dengan melakukan koordinasi dan sinergitas terhadap semua kementerian dan lembaga negara, BUMN dan industri swasta, untuk membangun industri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk melakukan inventarisasi terhadap industri-industri yang dapat ditumbuhkan, seperti: industri farmasi dan alat kesehatan, industri jamu, industri tekstil, industri kimia dasar, dan semua yang mendapatkan peluang dalam mengatasi Pandemi Covid-19.
5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk melaksanakan Perpres Nomor 40 tahun 2016 dan menindaklanjuti masukan asosiasi industri (GP Farmasi Indonesia, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, GP Jamu dan Obat Tradisional, dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia) perihal usulan penurunan harga gas US\$ 6 per MMBTU. Terkait penggunaan kurs mata uang asing oleh PT PGN Tbk untuk diubah menggunakan mata uang rupiah atau mematok nilai tukar rupiah untuk tetap pada angka Rp14.000,-/USD 1 serta penghapusan pemakaian biaya minimum untuk listrik dan gas.
6. Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian Perindustrian RI untuk melanjutkan kegiatan realokasi dan *refocusing* anggaran sejumlah Rp75 Miliar dalam membantu penanganan sektor industri terdampak Covid 19 terutama yang diprioritaskan untuk Industri Kecil Menengah (IKM).
7. Komisi VI DPR RI melihat kondisi pasca Pandemi Covid-19 akan merubah struktur permintaan dan penawaran pasar baik domestik maupun dunia, karena itu Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perindustrian membuat strategi pengembangan industri nasional yang berbasiskan kepada sumber daya unggulan di setiap daerah, yaitu: aset-aset, bahan-bahan baku atau komoditas-komoditas unggulan yang melimpah dan mampu menciptakan nilai tambah yang besar baik untuk pasar domestik maupun ekspor.
8. Komisi VI DPR RI meminta Eselon I Kementerian Perindustrian untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.11 WIB.

Jakarta, 28 April 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

TTD.

GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.
A-327